

# Covid-19 dan Risiko Ketahanan Gizi Anak Di NTB

Oleh : Herman Rakha\*

*Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah membawa dampak pada semua aspek kehidupan. Berbagai kebijakan pembatasan sosial telah dilaksanakan, baik tingkat nasional hingga daerah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona tersebut. Data terakhir dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang diakses melalui [www.corona.ntbprov.go.id](http://www.corona.ntbprov.go.id) menyebutkan, kasus Covid-19 di NTB hingga tanggal 16 Juli 2021 sebanyak 16.883 kasus dengan rincian 1.631 (9,66%) menjalani perawatan, 14.615 (86,57%) dinyatakan sembuh dan, 637 (3,77%) meninggal. Upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maka, pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Mataram dan PPKM Skala Mikro di 9 kabupaten/kota lainnya di NTB.*

*Kebijakan pembatasan tersebut tentunya telah memberikan dampak pada pengurangan aktivitas sosial dan ekonomi maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, termasuk didalamnya adalah pada kegiatan pelayanan gizi serta kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (2020) menunjukkan bahwa, pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan kunjungan pemeriksaan kehamilan serta pelayanan kesehatan bagi bayi, anak umur di bawah lima tahun (balita), dan anak. Hal ini juga berdampak pada tutupnya sebagian besar posyandu di Indonesia selama pandemi Covid-19.*

*Untuk itu, menarik untuk kita cermati dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan gizi masyarakat? Terutama melihat perkembangan status gizi anak yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak balita.*

## Covid-19 Dan Perkembangan Status Gizi Anak NTB

Sebelum datangnya pandemi Covid-19, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menghadapi permasalahan gizi. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019, masih ada 27,75 persen balita yang mengalami stunting. Angka prevalensi stunting ini menurun dibandingkan dengan angka prevalensi stunting pada hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang lalu yang mencapai 33,5 persen serta Riskesdas tahun 2013 sebesar 45,2 persen. Adanya penurunan angka prevalensi stunting ini menandakan bahwa berbagai bentuk intervensi yang dijalankan oleh Gubernur NTB Dr. Zulkifliemansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalillah menunjukkan hasil. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka stunting di Indonesia meningkat<sup>1</sup>. Kondisi ini tentunya akan

berdampak pada menyurutnya kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB dalam mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur, sesuai standar deviasi yang ditetapkan WHO. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi. Balita yang mengalami stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, morbiditas atau kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Intervensi yang paling mentukan yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dampak buruk bagi balita stunting di antaranya mudah sakit, gangguan pertumbuhan fisik dan metabolisme pada tubuh, serta di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam kemampuan

<sup>1</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/kepala-bkkbn-angka-stunting-naik-akibat-pandemi-covid-19>

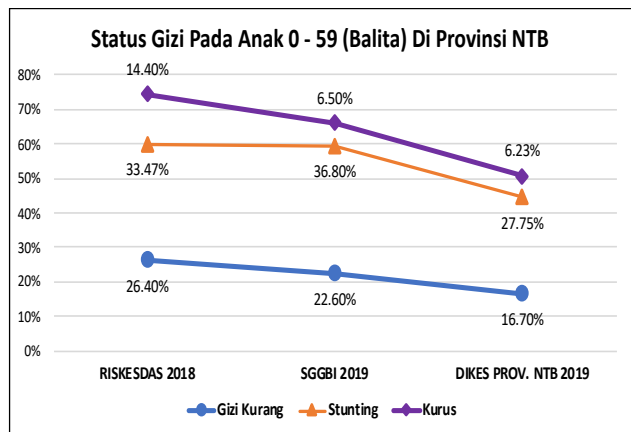
kognitif dan prestasi belajar, dan beresiko tinggi mengalami berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini tentunya dapat menjadi “warning” bagi capaian tersebut. Upaya mitigasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan Covid-19 akan berpotensi menghambat akses ibu dan anak terhadap layanan kesehatan yang optimal. Penurunan jumlah kunjungan ke layanan gizi tentunya juga akan menimbulkan potensi baru yaitu memunculkan masalah gizi dan kesehatan baru lainnya.

Menurut data dari aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kementerian Kesehatan, terdapat 23,8 persen atau 82.150 anak NTB mengalami prevalensi stunting pada tahun 2020<sup>2</sup>. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 terdapat 36,8 persen balita di NTB mengalami stunting. Selanjutnya terdapat 22,6 persen anak yang mengalami kurang gizi dan 6,50 persen anak yang mengalami wasting atau kurus.

Bagi keluarga yang masuk dalam kategori miskin tentunya menjadi yang paling rentan terhadap dampak dari Covid-19. Tindakan peningkatan pada layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak terutama yang mengalami masalah gizi harus segera dilakukan, mengingat risiko peningkatan penyakit dan kematian anak terkait dengan penyebaran Covid-19. Tingkatan stres orang tua juga akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan sosial ekonomi yang diterapkan, ujungnya akan berdampak pada pola asuh orang tua kepada anak. Situasi ini tentunya menjadi pengalaman yang merugikan bagi kesehatan anak, terutama dalam jangka panjang yaitu terhadap perkembangan kognitif, kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas

anak di masa depan ketika sudah beranjak dewasa.



Gambar 1. Perkembangan Status Gizi Anak (Balita) Di Provinsi NTB

Permasalahan gizi di masa pandemi ini tentunya semakin menambah beban pemerintah daerah dimana, dengan beragam kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 membuat berbagai pelayanan fasilitas kesehatan semakin terbebani. Pembatasan aktivitas masyarakat juga berdampak terhadap terganggunya rantai pasokan makanan, hilangnya pendapatan masyarakat akibat terkena PHK dapat menyebabkan adanya peningkatan dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di NTB.

Kebijakan-kebijakan pengangan Covid-19 mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintahan daerah berdampak terhadap model atau metode pelayanan kesehatan yang diberikan, seperti pos pelayanan terpadu (posyandu) serta pada pelayanan puskesmas yang mengalami pembatasan, berpotensi menjadi faktor pada yang melatarbelakangi kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pemberian imunisasi penambah darah. Sejak Maret 2020, di banyak wilayah di Indonesia, terdapat imbauan agar pelaksanaan posyandu ditunda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Posyandu dapat tetap dilaksanakan di wilayah zona hijau atau jika ada arahan khusus dari kepala daerah.

## Stunting Dan Lingkaran Kemiskinan

Masih tingginya angka stunting di NTB tentunya merupakan masalah serius didalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan NTB yang Gemilang dan Berdaya Saing (NTB Gemilang) 2023. Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro.

Masalah gizi pada stunting memang sudah lama diketahui dan ini juga terkait dengan kemampuan ibu dan anak untuk dapat mengakses makanan yang bergizi. Akses terhadap pemenuhan makanan bergizi ini juga tentunya dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di NTB yang menyebabkan ibu dan anak tak memperoleh gizi yang cukup. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2021 sebesar 746,66 ribu orang (14,14%). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97%).

Bagi Lombok Research Center (LRC), upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga, pemberian makanan tambahan, peningkatan akses air minum dan sanitasi memang memberikan dampak terhadap angka penurunan stunting di NTB. Namun, hulu dari penanganan stunting adalah permasalahan kemiskinan. Ketidaktahuan dan tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi motivasi utama untuk bertahan hidup. Rumah tangga yang miskin tidak akan dapat memenuhi asupan gizi untuk anaknya, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara agar tetap dapat bertahan hidup tanpa harus kelaparan, sehingga faktor kemiskinan ini menyebabkan mereka abai terhadap pentingnya asupan makanan yang bergizi. SDM yang tidak berkualitas tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga terjatuh dalam

kemiskinan. Seperti itulah kira-kira gambaran mengenai stunting dan pusaran kemiskinan.

Menurut Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, investasi melalui perbaikan gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga 3 persen dalam satu tahun. Data BPS menyebutkan untuk PDRB provinsi NTB tahun 2020 sebesar Rp133.521.764,68 atau naik 0,83 persen dari PDRB tahun 2019 yang mencapai Rp132.422.366,23.

Selain kemiskinan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB. Seiring kejadian pandemi Covid-19, tanggungjawab ini semakin besar dimana, menurut data BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 mencapai 4,22 persen atau 113.430 orang. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 85.501 orang (3,28%) dan tahun 2018 sebesar 84.293 (3,58%).

Ketidakmampuan untuk memiliki penghasilan yang tepat akan berdampak terhadap kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan maksimal, bahkan terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan asupan makanan yang bergizi bagi keluarganya. Banyak perilaku masyarakat yang tidak mendukung upaya pemberian asupan makanan bergizi bagi anak disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana masih banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga seringkali mempercayakan pengasuhan anak kepada anggota keluarga terdekat.

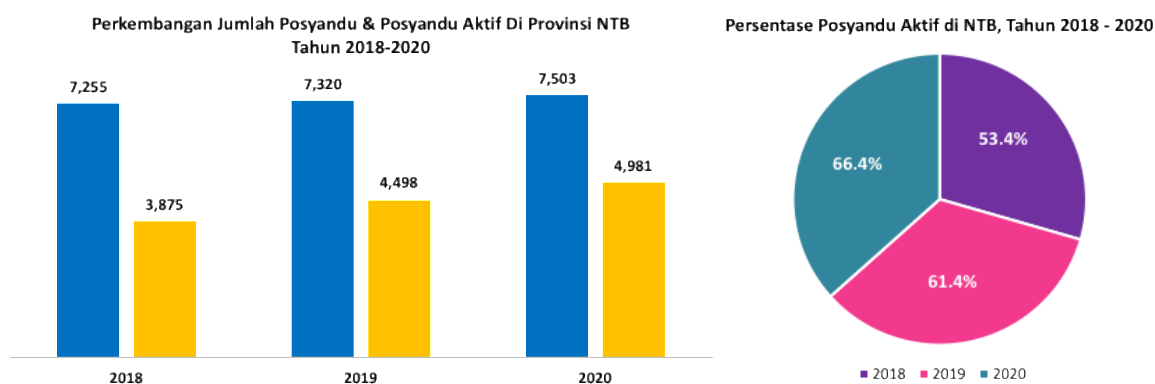
Pola pengasuhan anak balita stunting cenderung dilakukan oleh orang tua atau nenek balita terutama bagi ibu yang bekerja. Kondisi masih terbatasnya pengetahuan dari pengasuh (nenek) balita tentang gizi seimbang untuk balita, maka praktek dan kebiasaan makan anak yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang relatif sulit diterapkan. Apalagi nenek cenderung memberikan makanan yang disukai anak saja tanpa memperhatikan asupan

makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita.

### Revitalisasi Posyandu Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di NTB

Salah satu program unggulan NTB Gemilang 2023 didalam usaha menurunkan angka stunting di NTB adalah melalui program “Revitalisasi Posyandu”. Program ini dimaksudkan karena dari 7 ribu jumlah posyandu yang masih aktif, hanya ada sekitar 700 posyandu yang memiliki bangunan tetap, sidanya masih dijalankan dengan segala keterbatasan yang ada. Revitalisasi posyandu juga ditujukan untuk menjadikan posyandu

sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun. Data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, hingga tahun 2020 terdapat 7.503 posyandu dengan berbagai strata di seluruh wilayah NTB. Dari jumlah tersebut, 66,4 persen atau 4.981 merupakan posyandu aktif yang didukung oleh 35 ribu kader posyandu. Perkembangan posyandu di NTB dapat dilihat pada gambar 2 di bawah.



Gambar 2. Jumlah Posyandu Dan Persentase Posyandu Aktif di Provinsi NTB, Tahun 2018 - 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Keberhasilan dari program unggulan NTB Gemilang ini tentunya tidak hanya ditentukan dari kuantitas posyandu beserta kader posyandu. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana seorang kader posyandu memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk membantu mensukseskan program unggulan ini. kader posyandu diharapkan akan menjadi perantara antara petugas/ahli kesehatan dengan masyarakat serta dapat membantu masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghadapi/menjawab kebutuhan kesehatan mereka sendiri. Selain itu, kader posyandu harus juga memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya masyarakat,

memberikan advokasi dan membangun kemampuan lokal.

Salah satu daerah Kabupaten/Kota yang ada di NTB yang sukses dengan capaian revitalisasi posyandu adalah Kabupaten Lombok Timur<sup>3</sup>. Sebanyak 1.930 posyandu di seluruh kabupaten Lombok Timur telah berhasil direvitalisasi menjadi posyandu keluarga. Namun, apabila melihat data pada Status Gizi Nasional yang dilakukan melalui Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (*E-PPGBM*) Kementerian Kesehatan, capaian ini tentunya menjadi pertanyaan karena jumlah anak yang mengalami stunting di Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 (19.747 anak)

<sup>3</sup> <http://lombokita.com/lombok-timur-kabupaten-pertama-di-ntb-sukses-wujudkan-revitalisasi-posyandu/>

merupakan jumlah tertinggi diantara 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader mutlak dibutuhkan. Secara teknis, tugas kader yang terkait dengan gizi adalah melakukan pendataan balita, melakukan penimbangan serta mencatatnya dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), memberikan makanan tambahan, mendistribusikan vitamin A, melakukan penyuluhan gizi serta kunjungan ke rumah ibu yang menyusui dan ibu yang memiliki balita. Kader diharapkan berperan aktif dan mampu menjadi pendorong, motivator dan penyuluh masyarakat.

Selain kader dan jumlah posyandu, keberhasilan program unggulan NTB dalam penanganan stunting sangat ditentukan oleh peran orang tua terutama pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap pengetahuan mengenai stunting baik untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan perawatannya. Data BPS menyebutkan rata-rata lama sekolah di NTB pada tahun 2020 7,31 tahun, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun

2019 yang mencapai 7,27 tahun. Namun, angka rata-rata sekolah ini masih berada di bawah angka nasional yaitu 8,34 tahun (2019) dan 8,48 (2020).

Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) melihat bahwa peningkatan kapasitas posyandu dengan kadernya harus lebih meningkat secara kualitas bukan dari aspek kuantitas saja. Hal ini penting karena melihat tantangan yang dihadapi di tengah masyarakat dimana, masih ada perilaku dan kebiasaan masyarakat yang belum sejalan dengan upaya pemerintah dalam tindakan pendegahan dan penanggulangan stunting. Pengetahuan sebagian masyarakat tentang asupan makanan balita masih belum memadai. Pemberian makanan untuk balita baru sebatas agar anak kenyang dan anak cepat besar. Pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan gizi yang seimbang untuk balita, jenis makanan, pengolahan makanan hingga pengaturan ragam makanan masih belum memadai, yang mana dalam hal ini pemahaman masyarakat terkait kesehatan dan gizi balita masih terbatas.

---

\* Staf Peneliti pada Lombok Research Center (LRC)